

FILSAFAT EKONOMI PANCASILA MUBYARTO

*Hastangka*¹

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto. Mubyarto adalah seorang tokoh filsuf Ekonomi Pancasila. Secara konseptual, Ekonomi Pancasila menjadi aspek yang mendasar dalam paradigma ekonomi Indonesia. Persoalan tentang Ekonomi Pancasila Mubyarto muncul ketika mempertanyakan pertumbuhan ekonomi, persamaan, dan keadilan ekonomi; serta bagaimana gagasan Ekonomi Pancasila dapat menjelaskan tentang teori pertumbuhan di antara masyarakat industri dan pertanian. Tulisan ini akan membahas tentang hakikat dari Ekonomi Pancasila Mubyarto; cara kerja Ekonomi Pancasila dalam sistem perekonomian Indonesia; upaya Mubyarto dalam mengembangkan teorinya dalam bentuk praktis; dan tanggapan para ekonom dan ilmuwan Indonesia terhadap teori Ekonomi Pancasila. Tulisan ini merefleksikan bahwa Ekonomi Pancasila Mubyarto adalah pendekatan untuk melihat fenomena perilaku ekonomi pada masyarakat Indonesia; dan Ekonomi Pancasila Mubyarto adalah pendekatan alternatif untuk mempelajari ekonomi berbasis keIndonesiaan, serta gagasan teori tandingan dan teori ekonomi neo-klasik.

Kata kunci: pemikiran Mubyarto, Ekonomi Pancasila, teori pertumbuhan, filsafat.

Abstract

The purposes of this paper is to find and analyze on Mubyarto's thoughts of Pancasila Economics. Mubyarto is a great philosopher on the Pancasila Economics. Conceptually, the Pancasila Economics becomes a fundamental aspect of economics development paradigm in Indonesia. Issues on Mubyarto's thoughts of Pancasila Economics emerge when economic growth, equality, and economic justice are questioned; and how the Pancasila Economics can explain economic growth between industrial and agricultural principals. This paper discusses about essence of the Pancasila Economics, how it works, how Mubyarto theorizes it into practice, and how economists and scholars respond it. Finally, we conclude that Mubyarto's thoughts of the Pancasila Economics is an approach to see economy phenomena of Indonesian society; and it is an alternative approach to learn economic of Indone-sian characteristic against conservatism and economy theory of neo-classic.

Keywords: Mubyarto's thought, Pancasila'Economics, growth theory, philosophy.

A. Pendahuluan

Sejarah perkembangan pemikiran tentang ilmu dan konsep ekonomi di Indonesia sangat menarik untuk dikaji dari berbagai pendekatan terutama filsafat. Misalnya, kajian tentang filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto sampai sejauh ini belum banyak dikembangkan oleh para ilmuwan, pemikir, dan filsuf ekonomi Indonesia. Sejak meninggalnya Mubyarto tahun 2005, pemikiran tentang Ekonomi Pancasila belum menunjukkan kesepakatan apakah Ekonomi Pancasila

¹Peneliti pada Pusat Studi Pancasila UGM Yogyakarta, email: hastangka.yogya@gmail.com.

Mubyarto dijadikan sebagai ilmu, pendekatan, sistem filsafati, atau metodologi dalam Sistem Ekonomi Indonesia yang lebih besar dan kompleks ini; serta bagaimana keberlanjutan dalam pengembangan ilmu atau konsep ekonomi tersebut. Kajian Heri Santoso (2009: 41-56) tentang Ekonomi Pancasila Mubyarto pada *Jurnal Filsafat Vol. 19, Nomor 1, April 2009* dengan judul “Filsafat Ilmu Sosial Perspektif Pancasilaisme (Refleksi Kritis atas Konsep Filsafat Ilmu Ekonomi Pancasila Mubyarto)” menekankan Ekonomi Pancasila sebagai Ilmu Ekonomi Pancasila Mubyarto.

Santoso dalam tulisannya telah memberikan penjelasan secara komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan Ilmu Ekonomi Pancasila Mubyarto dan mengapa Ekonomi Pancasila Mubyarto disebut sebagai Ilmu Ekonomi Pancasila. Menurut Santoso Ilmu Ekonomi Pancasila dibangun atas dasar asumsi bahwa Ilmu Ekonomi Pancasila sarat dengan nilai yaitu nilai sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila (Santoso, 2009: 54; Mubyarto, 2004: 15). Santoso dalam tulisannya juga menekankan pemikiran filsafat Ilmu Ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto sebagai paradigma baru dalam keilmuan sosial dan ekonomi karena melihat kondisi keilmuan sosial yang mengalami kemacetan dan perkembangan ilmu ekonomi di Indonesia yang terhegemoni oleh pemikiran barat terutama arus utama dari neoklasikisme. Menurut Santoso, Ilmu Ekonomi Pancasila lahir sebagai kritik atas krisis yang terjadi dalam ilmu ekonomi neoklasik di Indonesia (Santoso, 2009: 55). Kajian tentang Ekonomi Pancasila Mubyarto, oleh karena itu menjadi topik menarik untuk dibahas dalam ranah filsafati melalui pendekatan kritis-filosofis. Pendekatan kritis digunakan untuk melihat cara para pemikir ekonomi melakukan kajian dan analisis terhadap persoalan ekonomi, baik dalam hal konsep, teori, maupun fenomena berekonomi. Pendekatan filosofis, digunakan untuk melihat aspek substansi di dalam teori dan konsep ekonomi yang telah dikembangkan oleh pemikir ekonomi, yang dalam hal ini Ekonomi Pancasila Mubyarto. Menurut Mubyarto dalam makalahnya berjudul “Lahirnya Ekonomi Pancasila” (2005) yang disajikan pada acara seminar bulanan Pusat Studi Ekonomi Pancasila, Ilmu Ekonomi Pancasila lahir didasarkan adanya keyakinan kekeliruan fatal ilmu ekonomi konvensional. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1999 telah menyebabkan kebingungan para pakar ekonomi untuk menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi di Indonesia. Ilmu Ekonomi Indonesia baru muncul dari peristiwa tersebut, yang kemudian disebut dengan Ekonomi Pancasila.

Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya

pada tahun 1945, kajian tentang ekonomi menjadi menarik untuk dilakukan hingga sekarang. Persoalan tentang konsep ekonomi yang harus dianut oleh Indonesia menjadi perdebatan yang serius di kalangan ekonom Indonesia terutama ketika sudah dikaitkan dengan empat hal, yaitu: *pertama*, ideologi ekonomi yang akan dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk merancang pembangunan perekonomian ke depan; *kedua*, landasan ekonomi Indonesia pascakemerdekaan Republik Indonesia; dan *ketiga*, arah dan visi pembangunan perekonomian Indonesia. Pada era kepemimpinan Soekarno, konsep tentang perekonomian Indonesia merujuk pada tiga kata kunci utama yaitu kemandirian, berdikari, dan berdaulat. Tiga kata kunci tersebut sering dikenal dengan konsep dasar Tri Sakti Pancasila. Dasar konseptual Tri Sakti Pancasila menekankan agar berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Sistem ekonomi Indonesia tersebut, namun demikian dalam prakteknya mengalami berbagai perubahan dan orientasi ideologis. Pada periode pendudukan Jepang tahun 1942-1945, perekonomian Indonesia menekankan pada prinsip-prinsip pragmatis yaitu dengan pengembangan produk perkebunan yang dapat memiliki nilai ekonomis tinggi dan menguntungkan penjajah. Misalnya, adanya gerakan wajib menanam pohon jarak, kopi, teh, cengkeh, karet, dan tembakau. Pada periode 1945-1959 perekonomian Indonesia berubah dengan menganut sistem ekonomi liberal yang telah menyebabkan harga tinggi dan nilai mata uang rendah. Sistem ekonomi liberal akhirnya kandas di tengah jalan dan kemudian pada tahun berikutnya digantikan dengan ekonomi terpimpin pada tahun 1959-1965. Dampak dari sistem ekonomi terpimpin tersebut juga menyebabkan defisit anggaran negara, bantuan luar negeri terhenti, dan pendapatan per kapita penduduk menurun sehingga negara mengalami “kebangkrutan” (Mubyarto, 1989:22-34).

Pada tahun 1965-1967, kekuasaan presiden Soekarno mulai melemah dan mengalami krisis kepemimpinan. Berbagai gejolak politik, sosial, dan ekonomi terjadi di Indonesia. Negara dalam keadaan yang kurang kondusif. Pada saat transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, dinamika pemikiran tentang dasar ideologis ekonomi apa yang harus dianut oleh Indonesia belum tampak. Baru ketika Soeharto menjadi presiden kedua Republik Indonesia secara sah, orientasi dan ideologi sistem ekonomi Indonesia mulai terlihat. Di masa pemerintahan Soeharto, orientasi pembangunan ekonomi diarahkan dengan merujuk pada program Pembangunan Jangka Panjang lima tahunan dan dua puluh lima tahunan.

Tulisan ini akan membahas tentang pemikiran Mubyarto, seorang ekonom Indonesia yang mengkaji konsep ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila; bagaimana konsep dan pemikiran tentang Ekonomi Pancasila tersebut lahir; dan apa dasar filosofis pemikiran Mubyarto dalam merumuskan dan menerjemahkan Ekonomi Pancasila. Perdebatan konseptual dan filosofis muncul ketika pandangan tentang Ekonomi Pancasila yang digagas dan diperkenalkan oleh Mubyarto sejak tahun 1979-an (Mubyarto, 1997: v) tersebut mendapatkan beragam kritikan dan pendapat dari berbagai ilmuwan. Tulisan ini akan menjawab beberapa pertanyaan terkait kajian Ekonomi Pancasila ini, yaitu: Ekonomi Pancasila Mubyarto; dasar filosofis yang dibangun oleh Mubyarto dalam merumuskan Ekonomi Pancasila; pokok perdebatan utama konsep Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila; dan implikasi teoritis bagi pengembangan ilmu ekonomi di Indonesia.

B. Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto

Filsafat lahir dari daya kritis manusia dan kemenangan rasionalitas atas mitos. Mitos dalam konteks kekinian adalah keyakinan dan anggapan bahwa sesuatu berasal dari luar kekuatan manusia. Pemikiran manusia juga akan dianggap mitos apabila tidak pernah dipertanyakan, didialogkan, dan dianggap benar begitu saja. Ewing (2008: 1) mendefinisikan filsafat sebagai upaya untuk menggambarkan pemikiran manusia sebagai keseluruhan dan realitas yang bisa diyakini memberikan gambaran tentang pengetahuan dan kebenaran. Kaitannya dengan hal ini, yang dimaksud dengan filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto adalah gambaran tentang pemikiran Ekonomi Pancasila Mubyarto sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Cikal bakal pemikiran Ekonomi Pancasila dapat berkembang hingga satu dekade terakhir ini berkat kontribusi Mubyarto, filsuf ekonomi Indonesia yang sangat intensif menggali dan mengembangkan konsep Ekonomi Pancasila, serta memasyarakatkannya dalam berbagai kegiatan akademik dan kemasyarakatan.

Persoalan ekonomi menjadi kompleks ketika sudah dihadapkan dengan masalah-masalah kenyataan hidup, seperti kemiskinan, pengangguran, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa. Ekonomi akan menjadi rujukan utama dalam menjawab permasalahan tersebut. Secara konseptual, kegelisahan tentang terhegemoninya pemikiran ekonomi Indonesia oleh tradisi Barat dirasakan juga oleh Mubyarto ketika ia aktif sebagai seorang pengajar dan kepala Pusat Studi Ekono-

mi Pancasila, Universitas Gadjah Mada.

Mubyarto lahir di Yogyakarta pada tanggal 3 September 1938. Semasa kecilnya ia tinggal di kota tersebut dan menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah dasar hingga sarjana muda di kota yang sama. Ia mendapatkan gelar sarjana muda di Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada. Gelar *Master of Art* diperoleh di *Vandebilt University* Amerika Serikat tahun 1962 dan gelar Doktor diraihinya pada usia 27 tahun di *Iowa State University* pada tahun 1965. Mubyarto mempunyai perhatian yang serius pada persoalan ekonomi desa tertinggal atau sering dikenal sebagai ekonomi rakyat. Ketika mendapatkan kesempatan masuk dalam jajaran pemerintahan Bappenas tahun 1993, Mubyarto bersama koleganya Sayogyo, sosiolog pedesaan IPB dan Direktur LSM Bina Swadaya, Bambang Ismawan, telah berhasil mengembangkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) sebagai program pengentasan kemiskinan (lihat http://mubyarto.org/_profil.php). Mubyarto, di Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP), juga mengembangkan Kursus Ekonomi Pancasila yang diberikan kepada masyarakat umum. Tujuan dari kursus Ekonomi Pancasila tersebut adalah untuk memasyarakatkan dan mengembangkan teori dan ilmu ekonomi berkarakter keindonesiaan, yang dalam hal ini berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Mubyarto, selain itu juga mengggagas *stadium generale* kuliah Ekonomi Pancasila bagi mahasiswa ekonomi di UGM (lihat Mubyarto, 2004: 159-169).

Kontribusi Mubyarto terhadap pengembangan konsep Ekonomi Pancasila telah menjadikannya sebagai seorang tokoh utama penggali dan penggagas Ekonomi Pancasila dalam konteks keilmuan. Mubyarto memberikan terobosan baru dalam hal metode pengajaran ilmu ekonomi. Ia menyarankan agar para dosen ilmu ekonomi di perguruan tinggi mengubah metode pengajarnya dari metode deduktif-logis menjadi metode induktif-empirik dengan menggunakan contoh-contoh ekonomi Indonesia dari kehidupan nyata (Mubyarto, 2004: 167). Penggunaan metode induktif, namun demikian, juga memiliki kelemahan karena observasi-observasi dilakukan dalam ruang yang terbatas dan kesimpulannya tidak bisa digeneralisasikan. Salah satu kritik utama dari penggunaan metode induktif ini adalah kebenaran dari kesimpulan metode induktif yang masih bisa diperdebatkan dan belum tentu benar (Macrone, 2008: 55-60). Saran penggunaan metode induktif-empirik oleh Mubyarto akan berdampak pada kesimpulan yang tidak bisa digeneralisasikan untuk menegaskan Ekonomi Pancasila sebagai Sistem Ekonomi Indonesia. Pandangan Santoso (2009: 55) terkait pengembangan Ilmu Ekonomi Pancasila secara metodologis, melalui penggunaan metode deduktif dan induktif secara propo-

sional, berbeda dibandingkan dengan pandangan Mubyarto yang hanya menekankan metode induktif-empirik. Asumsi tersebut akan lebih bisa diterima sebagai masukan dalam pengembangan Ilmu Ekonomi Pancasila sebagai metode untuk melawan arus pemikiran Barat.

Kant berpandangan bahwa hipotesis ilmiah tidak muncul dari observasi tetapi muncul dari proses kreasi imajinasi bebas individu atau kelompok (Macrone, 2008: 59). Observasi dan eksperimen oleh karenanya adalah proses untuk uji coba bukan untuk menciptakan teori. Selama proses uji coba tersebut untuk menunjukkan apakah ada kesalahan atau tidak, bukan semata-mata dengan membuktikan teori sebagai suatu yang pasti benar. Hamid (2008) juga menjelaskan bahwa pemikiran Mubyarto berpijak pada dua isu utama, yaitu: (1) bagaimana membangun ekonomi nasional yang sesuai dengan ideologi bangsa; dan (2) bagaimana mengembangkan ilmu dan pendidikan ekonomi alternatif yang berpijak pada sistem nilai, sosial-budaya, dan kehidupan ekonomi riil (*real life economy*) masyarakat Indonesia. Dua poin utama tersebut telah diuraikan oleh Hamid secara komprehensif, yakni bahwa pemikiran Mubyarto terkait pembangunan ekonomi nasional adalah dengan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan visi perekonomian Indonesia yaitu Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Dasar rasional yang digunakan dari dipilihnya Sistem Ekonomi Pancasila ini adalah karena sistem ekonomi suatu negara hendaknya juga harus mengacu pada ideologi dan konstitusi negara tersebut. Jawaban atas kegelisahan krisis ilmu ekonomi di Indonesia terkait dengan pengembangan ilmu ekonomi alternatif, Mubyarto menekankan konsep manusia Indonesia yang tidak semata-mata berpijak pada *homo economicus*, namun berpijak pada sistem nilai sosial-budaya, kehidupan ekonomi riil masyarakat Indonesia, serta ilmu ekonomi yang tidak bebas nilai. Adapun solusi yang ditawarkan oleh Mubyarto adalah dengan revolusi paradigmatis pengajaran Ilmu Ekonomi Indonesia. Mubyarto mengkritisi secara tajam tentang pengajaran ilmu ekonomi di Indonesia sebagai berikut:

“Ilmu Ekonomi (*economics*) yang diajarkan kepada mahasiswa Indonesia sejak medio lima puluhan, yang didasarkan pada asumsi persaingan pasar sempurna, terbukti tidak cocok (tidak realistis) untuk menggambarkan perilaku ekonomi manusia Indonesia. Jika rasionalitas ekonomi ini di dunia Barat pun sudah dipertanyakan, adalah aneh jika kita di Indonesia bersikukuh dengan ajaran ekonomi neoklasik konvensional ini.

Ilmu ekonomi yang benar yang seharusnya dikembangkan di Indonesia adalah ilmu ekonomi koperasi, bukan ilmu ekonomi persaingan” (Mubyarto, 2003: 12).

Pernyataan tersebut memberikan serangan terhadap para ekonom untuk melakukan revolusi pemikiran bahwa konsep ekonomi neoklasik yang diajarkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sudah tidak layak lagi untuk diajarkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan akar kepribadian bangsa Indonesia. Amanat pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menekankan bahwa hakikat pendidikan adalah sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan terabaikan oleh praktek pendidikan Barat yang masih dijalankan di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan lainnya. Revolusi pemikiran yang diharapkan mampu mengubah cara pandang dan pola pikir masyarakat tentang perilaku berekonomi akan melahirkan prinsip ekonomi Indonesia yang berakar dari ekonomi rakyat. Ideologi ekonomi dipilih pada dasarnya memiliki tujuan utama, yaitu untuk menyejahterakan dan memakmurkan bangsa. Fondasi ekonomi harus dibangun dengan kokoh dan tangguh untuk mencapai kesejahteraan nasional. Ilmu dan teori ekonomi yang memiliki kredibilitas dan dapat diyakini mampu memberikan dasar dan arahan yang jelas dalam praktek kebijakan dan berekonomi dibutuhkan untuk membangun fondasi ekonomi. Ilmu dan teori ekonomi untuk itu harus diciptakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan negara yang sedang membangun perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat. Ilmu ekonomi alternatif sebagaimana disebutkan sebagai Ilmu Ekonomi Pancasila pun menjadi relevan untuk dikembangkan.

1. Pengertian teori, ilmu, dan sistem Ekonomi Pancasila Mubyarto

Gagasan tentang Ekonomi Pancasila muncul sebagai wujud atas diterimanya ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Pokok bahasan ini akan menjelaskan pengertian dan perbedaan penekanan antara Teori Ekonomi Pancasila, Ilmu Ekonomi Pancasila, dan Sistem Ekonomi Pancasila. Pengertian ilmu selalu mengalami perubahan baik dari aspek pemaknaan, tujuan, maupun unsurnya. Ilmu berkembang pesat dan berakar dari pemikiran manusia. Istilah ilmu, dalam sejarahnya, berkembang di benua Eropa (Ravertz, 2009: 27-49). Kata “ilmu” pada umumnya merujuk pada bidang-bidang khusus, seperti ilmu kedokteran, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu pendidikan. Ilmu memberikan batasan tertentu. Charles Singer mendefinisikan ilmu sebagai proses yang

membuat pengetahuan (*science is the process which makes knowledge*) (Adib, 2011: 49). Ilmu berkembang sejalan dengan perkembangan pengetahuan manusia dalam menggali fenomena yang ada di kehidupannya. Misalnya, Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai ilmu karena telah menunjuk pada bidang pokok bahasan tertentu yaitu ekonomi.

Definisi tentang Ekonomi Pancasila banyak diperkenalkan oleh Mubyarto sejak tahun 1970-an. Mubyarto, dalam artikel di surat kabar *Kompas* (12/11/2003) yang berjudul “Menembus Dosa-dosa Ekonomi Indonesia” mendefinisikan Ekonomi Pancasila sebagai berikut:

“Ekonomi Pancasila adalah ekonomi pasar yang mengacu pada ideologi Pancasila. Artinya mekanisme bekerjanya (sistem) ekonomi Pancasila didasarkan pada data-data riil ekonomi Indonesia dan tindakan pelaku-pelaku ekonomi yang moralistik, sosio-nasionalistik, dan sosio-demokratik. Ekonomi Pancasila bukanlah ekonomi normatif (*das sollen*) tetapi ekonomi positif (*das sein*) sekaligus normatif, karena menggambarkan secara riil perilaku nyata manusia Indonesia yang merupakan *homo socius*, *homo ethicus*, sekaligus *homo economicus* dalam sistem ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan” (Hastangka, 2007: 78).

Mubyarto juga membandingkan konsep ekonomi Indonesia dengan konsep ekonomi yang digagas oleh Adam Smith. Menurut Mubyarto, Adam Smith dalam mengembangkan ilmu ekonominya juga memasuki wilayah filsafat moral, tetapi konsep *homo economicus* Adam Smith hanya menyoroti aspek manusia sebagai individu dan dimensi moralitasnya, tetapi terlepas dari nilai moral agama. Konsep Ekonomi Pancasila Mubyarto menegaskan bahwa unsur agama (Islam, Hindu, Budha, Kristen, Darma) masih kuat peranannya. Konsep ini oleh karenanya berbeda dengan tradisi yang dibawa oleh semangat liberalisme pada abad ke-18 yang menyebabkan kerenggangan hubungan antarnilai agama, semangat berdagang, dan berekonomi (lihat Mubyarto, 1997: 88). Wijaya (2009: 21) juga menjelaskan konsep Smith tentang ekonomi liberalnya. Adam Smith mempercayai bahwa perdagangan bebas adalah perlu dengan menempatkan konsumen di depan produsen yang memberikan kesempatan untuk setiap individu berkompetisi dalam berekonomi. Smith juga menegaskan bahwa kemakmuran dapat dicapai apabila setiap individu diberi kebebasan untuk mengatur kehidupan ekonominya (Wijaya, 2009: 20). Hal tersebut bertolak belakang dengan dasar moral yang dibangun oleh Ekonomi Pancasila Mubyarto.

Dasar moral Ekonomi Pancasila mengedepankan gotong royong, kebersamaan, kemanusiaan, dan kekeluargaan. Menurut Mubyarto Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang sejalan, sesuai, dan setia pada asas-asas Pancasila (Mubyarto, 2003: 19), sedangkan dasar moral ekonomi Smith adalah kebebasan individu. Mubyarto, namun demikian juga mengakui bahwa Ekonomi Pancasila yang dikembangkannya merujuk pada ajaran asli ilmu Ekonomi Adam Smith, yaitu ilmu ekonomi yang tidak terlepas dari faktor etika dan moral karena di dalam tulisan Smith yang pertama (*The Theory of Moral Sentiment*) dijelaskan bahwa manusia adalah *homo socius* dan *homo ethicus* (lihat Mubyarto dalam makalah berjudul “Lahirnya Ekonomi Pancasila”, 2005). Ajaran asli Smith tersebut sejalan dengan prinsip dasar Ekonomi Pancasila. Kaitannya dengan teori ekonomi, Clelland dan Winter (1987: 19) menjelaskan bahwa kebanyakan teori ekonomi berkembang pesat karena berangkat dari kebutuhan. Logika sederhananya adalah masyarakat pasti membutuhkan barang atau jasa baru. Kebutuhan tersebut akan mendorong manusia untuk melakukan investasi lebih besar untuk memenuhi kebutuhannya. Teori ekonomi oleh karenanya berkembang pesat sejalan dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Selain tentang kebutuhan, persoalan fundamental ekonomi juga berakar pada masalah kelangkaan (*scarcity*) barang dan jasa. Kelangkaan tersebut menimbulkan persoalan ekonomi, yaitu tentang bagaimana orang harus mendapatkan barang dan jasa, dengan cara apa, dan seperti apa prosesnya. Usaha untuk memecahkan permasalahan kelangkaan tersebut menimbulkan dua konsep dasar, yaitu “persaingan” atau “kerjasama” antarpelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut Mubyarto dalam bukunya yang berjudul *Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila*, Ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi baru yang masih dicari-cari tetapi harus diciptakan untuk mengganti sistem ekonomi yang kini dianut oleh bangsa Indonesia. Bibit-bibit sistem Ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama pada masyarakat pedesaan dalam bentuk usaha bersama berdasar atas kekeluargaan (Mubyarto, 2004: 20). Definisi Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila di atas telah memberikan gambaran bahwa Ekonomi Pancasila berpijak pada fondasi konstitusi Indonesia. UUD 1945 pasal 33 sebelum amandamen menjelaskan bahwa ayat (1) pokok pikirannya adalah bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama. Menurut pemikiran Hatta, perekonomian Indonesia berasaskan gotong-royong, kekeluargaan, dan bernafaskan koperasi. Mubyarto dalam hal ini tidak menjelaskan secara tegas perbedaan antara

Ekonomi Pancasila dan ekonomi koperasi. Berbagai tulisan Mubyarto menunjukkan konsep koperasi dianggap sejalan dengan pemikirannya tentang Ekonomi Pancasila, sehingga dapat dikatakan bahwa Ekonomi Pancasila adalah juga bagian dari ekonomi koperasi. Mubyarto menegaskan bahwa koperasi adalah '*soko guru*' perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama (Swasono, 2009: 354). Menurut Swasono (2009: 355) Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berorientasi atau berwawasan pada nilai-nilai Pancasila. Hatta menggambarkan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan sosialis-religius atau sosialisme Indonesia (Swasono, 2009: 354). Menurut Kartasasmita (1997: 3) Ekonomi Pancasila berakar dari bumi Indonesia. Menurutnya, dalam Ekonomi Pancasila tidak dikenal '*economic animal*', yang diartikan sebagai 'yang satu memangsa yang lain'. Kartasasmita mendefinisikan pengertian Ekonomi Pancasila sebagai berikut:

“Ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat materialistis, karena berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan yang timbul dari pengakuan kita pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan menjadi landasan spiritual, moral, dan etik bagi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian Ekonomi Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etika, sehingga pembangunan nasional kita adalah pembangunan yang berakhlak” (Kartasasmita, 1997: 3).

Swasono (*Ed.*) dengan jelas memberikan definisi dan landasan Ekonomi Pancasila dalam makalahnya yang berjudul “Orientasi Ekonomi Pancasila” dalam *Wawasan Ekonomi Pancasila* (1981):

“Ekonomi Pancasila adalah pandangan filsafati di bidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi langsung dari diterimanya Pancasila di negeri ini. Jika Pancasila adalah khas Indonesia, maka Ekonomi Pancasila adalah khas Indonesia. Secara *normatif*, landasan daripada Ekonomi Pancasila adalah apa yang terkandung di dalam Pembukaan, pasal 23, 27 ayat (2), pasal 33, dan 34 Undang-Undang Dasar 1945” (Madjid dan Swasono, 1981: 1).

Mubyarto dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto* (1997: 77) mendefinisikan Sistem Ekonomi Pancasila sebagai berikut:

“Sistem Ekonomi Pancasila ialah suatu sistem “ideal” atau “idaman” yang di dalamnya antara lain kita temukan semangat

usaha bersama yang kuat di antara pelaku-pelaku ekonomi. Jika dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan koperasi merupakan bentuk perusahaan yang sesuai maka haruslah diartikan bahwa, dibanding perusahaan negara dan perusahaan swasta, koperasi ialah wadah yang paling mudah untuk mewujudkan semangat usaha bersama”.

Bandungkan dengan pengertian Mubyarto tentang Teori Ekonomi Pancasila dalam makalahnya berjudul “Lahirnya Ekonomi Pancasila” (2005) sebagai berikut.

“Teori Ekonomi Pancasila adalah teori ekonomi khas Indonesia yang 'model' dan penerapannya selalu bersifat multidisipliner dan sekaligus transdisipliner. Teori Ekonomi Pancasila tidak menggunakan asumsi-asumsi *ceteris paribus*. Tetapi memasukkan semua variabel yang benar-benar harus dipertimbangkan. Jika Pancasila mengandung 5 asas, maka semua sila Pancasila yaitu (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) kerakyatan/demokrasi, dan (5) keadilan sosial, harus dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun. Jika di samping Pancasila juga selalu disebutkan asas kekeluargaan dan kemasyarakatan sebagaimana dikandung dalam pasal 33 UUD 1945, maka menjadi lengkaplah 'model' Ekonomi Pancasila, yaitu model ekonomi 'holistik' yang tidak memisahkan masalah ekonomi dari masalah sosial, masalah budaya, masalah moral/etik, dll.. Yang ada adalah masalah yang dihadapi manusia Indonesia, yang tidak perlu diurai menjadi masalah-masalah yang sangat terpisah-pisah, yang untuk menganalisis masing-masing diperlukan disiplin ilmu sendiri.”

Pengembangan pemikiran, teori, dan Sistem Ekonomi Pancasila di atas menunjukkan bahwa Ekonomi Pancasila adalah konsep normatif atas kondisi ekonomi dunia yang tidak berpihak pada realitas bangsa Indonesia. Pengertian Ilmu Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto dalam *Lahirnya Ekonomi Pancasila* (2005) adalah ilmu ekonomi kelembagaan (*institutional economics*) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai ideologi negara, yang kelima silanya, secara utuh maupun sendiri-sendiri, menjadi rujukan setiap pelaku ekonomi orang Indonesia. Mubyarto juga menjelaskan cara untuk mengembangkan Ilmu Ekonomi Pancasila sebagai disiplin keilmuan, yaitu:

“Ilmu Ekonomi Pancasila dikembangkan dengan mendalami perilaku pelaku-pelaku ekonomi rakyat mencakup kelima sila Pancasila, yaitu ilmu ekonomi sebagai ilmu ekonomi etik,

ilmu ekonomi humanistik, ekonomi nasionalistik, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial. Dalam pendalaman ini selalu diingatkan bahwa sila ke-1 dan ke-2 adalah dasar sistem ekonomi, sila ke-3 dan ke-4 adalah cara atau metode berperilaku dari pelaku-pelaku ekonomi, dalam mewujudkan tujuan berekonomi yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pada dasarnya Ilmu Ekonomi Pancasila Mubyarto yang akan dikembangkan sedang mencari bentuk dan model yang tepat untuk masuk dalam kancah ilmu. Pencarian metode yang tepat untuk memberikan validasi terhadap metode ilmiah Ilmu Ekonomi Pancasila sampai sejauh ini merujuk pada nilai-nilai Pancasila.

2. Dasar yuridis Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila Mubyarto memiliki landasan yuridis konstitusional, yakni bahwa ekonomi Indonesia hendaknya mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen yang mengatakan bahwa:

Ayat 1 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Ayat 2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.

Ayat 3 : Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 tersebut sudah jelas memberikan legalitas terhadap penyusunan perekonomian bangsa Indonesia. Sistem Ekonomi Pancasila yang disusun oleh Mubyarto sudah memiliki fondasi yuridis pada waktu itu untuk dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi, sistem ekonomi, dan pengembangan teori ekonomi alternatif di Indonesia. Dasar yuridis tersebut, namun demikian sampai sejauh ini belum pernah diterapkan dalam konteks sistem ekonomi Indonesia.

3. Dasar filosofis Ekonomi Pancasila

Kerangka filosofis Ekonomi Pancasila Mubyarto bertitik tolak pada sila-sila Pancasila. Pemahaman tentang nilai-nilai pada sila-sila Pancasila menjadi ukuran untuk menerjemahkan mekanisme atau proses kerja Sistem Ekonomi Pancasila yang akan dikembangkan dalam kehidupan perekonomian di Indonesia. Dasar filosofis Ekonomi Pancasila yang dimaksud di sini adalah dasar pemikiran yang melandasi

Ekonomi Pancasila sebagai ilmu dan sistem yang akan dijalankan untuk menjadi pedoman dalam perilaku berekonomi dan keilmuan. Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan dasar negara mempunyai peranan penting dalam praktek berekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam pengembangan ilmu ekonomi Indonesia. Notonagoro (1951: 9) dalam tulisannya yang berjudul *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia* menegaskan bahwa Pancasila dapat digunakan sebagai dasar pendidikan dan pengajaran serta usaha pengembangan ilmu pengetahuan. Suryohadiprojo (1987: 11) juga menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman untuk perilaku, pemikiran, perasaan, dan perbuatan bangsa Indonesia. Tujuan hidup berbangsa dan bernegara di negeri mono-pluralistik (dalam istilah Notonagoro) tersebut membutuhkan suatu kondisi kehidupan yang aman, nyaman, dan tertib. Ketertiban dapat dicapai apabila masyarakat Indonesia dapat tunduk dan taat pada norma, aturan, dan hukum yang berlaku. Pemikiran Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila bertitik tolak pada asumsi bahwa Indonesia adalah negara yang berideologi Pancasila, sehingga Pancasila diterima sebagai landasan moral dan prinsip kerja dalam praktek berekonomi (Hastangka, 2007: 121).

Nilai Pancasila yang dimaksudkan sebagai dasar filsafati Ekonomi Pancasila Mubyarto adalah ketuhanan (religiusitas), kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Argumen yang ditawarkan oleh Mubyarto, namun demikian, akan sangat bertolak belakang dengan argumen Mochtar Lubis tentang karakter manusia Indonesia. Menurut Lubis (2008: vii) ada 6 karakter manusia Indonesia yang di dalamnya tidak mencerminkan sama sekali nilai-nilai Pancasila. Adapun enam karakter manusia Indonesia tersebut adalah munafik (hipokrit), enggan atau segan bertanggung jawab atas perbuatannya, bersikap dan berperilaku feodal, percaya tahayul, berbakat seni, dan lemah watak atau karakternya. Berdasarkan 6 karakter manusia Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa Lubis memaparkan karakter manusia Indonesia dengan melihat tiga pendekatan, yaitu pendekatan budaya, sosial, dan psikologis. Pandangan Lubis tentang manusia Indonesia di atas bertolak belakang dengan harapan Mubyarto yang mengasumsikan manusia Indonesia adalah manusia Pancasila-lais. Manusia Pancasila-lais yang diterjemahkan dengan berketuhanan, berperikemanusiaan, berpersatuan, merakyat, dan berkeadilan tersebut diharapkan mampu menggerakkan perekonomian rakyat.

Persoalan akan muncul ketika dasar yang digunakan oleh Mubyarto dalam mengkontekstualisasikan Ekonomi Pancasila dalam kehidupan berekonomi sudah tidak memiliki legitimasi hukum dan

sosial. Adapun persoalan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, apakah ada jaminan bahwa seluruh perilaku manusia Indonesia sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila sehingga roda perekonomian Indonesia bernafaskan kekeluargaan, kerja sama, gotong-royong, dan *tepa selira*? Kedua, apakah negara dapat memberikan kepastian hukum dan dapat menegakkan konstitusi sebagaimana yang tertulis dalam amanat Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 terutama pasal 33 untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dan menyejahterakan rakyat dengan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang ada? Ketiga, Pancasila di era reformasi dan pascaamandemen UUD 1945 ini banyak menghasilkan produk undang-undang yang berpihak pada kapitalisme global dan praktek ekonomi liberal seperti UU Energi, UU Sisdiknas, UU Pertambangan, UU Penanaman Modal Asing, dan UU Ketenagalistrikan. Keempat, dasar filosofis apa lagi yang dapat memberikan penjelasan atas Ekonomi Pancasila apabila dikembangkan sebagai ilmu dan teori ekonomi alternatif Indonesia apabila di negara ini masih terjadi inkonsistensi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara? Misalnya, dalam UU Sisdiknas Pendidikan Pancasila sudah tidak lagi diwajibkan dan masuk dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah. Kelima, dasar filsafat praktis Ekonomi Pancasila Mubyarto belum menjelaskan tentang bagaimana sistem ekonomi yang akan dikembangkan, apakah berpijak pada padat karya atau padat modal?

C. Dimensi Kritis Ekonomi Pancasila Mubyarto

Berbagai tanggapan tentang Ekonomi Pancasila Mubyarto sejak tahun 1980-an menghasilkan gagasan baru tentang teori dan ilmu ekonomi yang seharusnya dikembangkan di Indonesia tanpa harus mengurangi dasar filosofis Ekonomi Pancasila Mubyarto. Robbins (2008) dalam <http://plato.stanford.edu/entries/economics/> menjelaskan bahwa ilmu ekonomi (*economics*) tidak hanya sekedar memusatkan perhatian pada isu-isu produksi, nilai tukar, distribusi, konsumsi dan semacamnya. Ilmu ekonomi memusatkan perhatiannya pada segala aspek tindakan manusia. Dopfer menjelaskan bahwa paradigma ekonomi di dunia sekarang ini mengarah pada sistem ekonomi pasar (Hastangka, 2007: 123). Dalam konteks paradigma ekonomi global tidak dapat dipisahkan bahwa pemikiran ekonomi yang berkembang sekarang ini adalah model pemikiran ekonomi liberal. Nangoi (2004: 14) menjelaskan bahwa perubahan ekonomi dunia telah membawa proses liberalisasi dan multilateralisasi ekonomi. Menurut Nangoi proses tersebut dimaknai sebagai keterbukaan dan integrasi ekonomi pada tingkat global. Konsep kesejahteraan, kelangkaan barang dan

jasa, dan kebutuhan manusia menjadi dasar utama agar tuntutan manusia modern sekarang dapat terpenuhi. Secara praktis mekanisme ekonomi yang berjalan adalah mekanisme pasar, yaitu ketika pemenuhan kebutuhan manusia harus dilakukan dengan cara kompetisi karena langkanya barang dan jasa dan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa tersebut. Pada akhirnya, ideologi ekonomi menjadi pilihan untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan dalam praktek berekonomi, apakah dengan cara bekerja sama atau berkompetisi. Persoalan ideologis timbul ketika interaksi ekonomi sudah berkembang melintasi batas wilayah negara dan bangsa. Sutrisno (2006: 29) menjelaskan bahwa ideologi secara konseptual memiliki fungsi yang berkaitan yaitu fungsi distorsi, fungsi legitimasi, dan fungsi integrasi. Proses pemilihan ideologi ekonomi tertentu membawa konsekuensi terhadap sistem ekonomi yang akan dianut dan disusun oleh negara. Kompleksitas dan tata cara berekonomi dalam hal ini tidak dapat berpihak pada ideologi dari negara tertentu karena masing-masing akan membawa ideologi sendiri. Catatan kritis dinamika internal dalam pengembangan Ekonomi Pancasila Mubyarto, menurut Budiman adalah sampai sejauh mana Ekonomi Pancasila Mubyarto dapat menjelaskan di dalam struktur sosial dan politik yang seperti apa Ekonomi Pancasila Mubyarto dapat dilaksanakan (lihat Hastangka, 2007: 19-20). Selama ini perdebatan tentang Ekonomi Pancasila lebih menitikberatkan pada metodologi dan orientasi model pengembangan Ekonomi Pancasila daripada memberikan kerangka operasional terhadap pelaksanaan Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menekankan bahwa arah perencanaan pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2005-2025 melalui perekonomian yang disusun berlandaskan pada demokrasi ekonomi dan persaingan sehat dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat (lihat <http://www.bappenas.go.id/node/45/766/tahun-2005-2025-per-7-januari-2005-/>). Perencanaan pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi yang dirumuskan oleh Bappenas tampaknya tidak sejalan dengan dasar-dasar Ekonomi Pancasila Mubyarto. Semangat demokrasi ekonomi dan persaingan sehat yang ditetapkan oleh Bappenas tersebut adalah unsur yang ditolak dalam Ekonomi Pancasila Mubyarto. Bappenas, namun demikian telah merumuskan arah dan kebijakan PJP dengan menekankan pada semangat demokrasi ekonomi liberal. Kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat menjadi pernyataan yang ambigu. Apakah ini menunjukkan sebagai

pentingnya individu-individu untuk berusaha semaksimal mungkin dan berkompetisi dalam mengakses sumber daya yang ada, atau pentingnya kerja sama dalam membangun perekonomian nasional?

Bappenas juga merumuskan tentang perekonomian yang berorientasi dan berdaya saing global dengan menekankan pada keunggulan kompetitif. Perkembangan ekonomi global telah mendelegitimasi dan mereduksi prinsip-prinsip moral Ekonomi Pancasila. Masa depan perekonomian dan perdagangan Indonesia akan tidak terlepas dari pengaruh kesepakatan ekonomi bilateral, regional, dan multilateral. Misalnya, kesepakatan GATT dalam menentukan tarif dan pajak telah mempengaruhi iklim investasi dan ekonomi dalam negeri, ketentuan WTO membawa dampak pada liberalisasi ekonomi dan pendidikan di Indonesia, perjanjian *Asian Free Trade Agreement (AFTA)* tahun 2002 juga membawa dampak pada masuknya berbagai barang impor tanpa *screening* yang ketat. Pemberlakuan perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)* pada tahun 2010, telah membawa dampak ekonomi rakyat kehilangan pasar dalam negeri karena membanjirnya produk China dari berbagai sudut seperti manufaktur hingga produk rumah tangga. Kedaulatan ekonomi Indonesia tergadai dan terpasung dengan adanya berbagai kesepakatan ekonomi regional dan multilateral yang jelas merugikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Globalisasi ekonomi telah menyebabkan munculnya berbagai blok perdagangan baik skala regional maupun internasional.

Ekonomi Pancasila yang diasumsikan oleh Mubyarto sebagai ekonomi pasar yang berdasarkan pada ideologi Pancasila dengan mengamati dan mendalami perilaku para pelaku ekonomi rakyat terbukti belum mampu menunjukkan perannya dalam proses pembangunan ekonomi nasional. Ada beberapa persoalan mendasar dalam Ekonomi Pancasila Mubyarto. Pertama, lemahnya dukungan politik dari pemerintah untuk membangun Sistem Ekonomi Pancasila dengan menggunakan data-data riil ekonomi masyarakat Indonesia. Komitmen pemerintah yang terlalu melihat keluar persoalan ekonomi global telah membawa konsekuensi pada terbengkalainya ekonomi dalam negeri. Kedua, perilaku para pelaku ekonomi rakyat tidak mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Ketidakmampuan para pelaku ekonomi rakyat tersebut lebih dikarenakan tidak adanya perlindungan, jaminan, dan dukungan dari pemerintah untuk mendorong mereka mengembangkan kerja sama dan produktivitas yang dapat diminati oleh pasar dalam negeri dan luar negeri. Ketiga, persoalan perilaku para konsumen dalam negeri yang belum berpihak pada ekonomi rakyat membawa konsekuensi matinya pasar ekonomi rakyat di dalam negeri. Secara teoritik, Ekonomi Pancasila

Mubyarto belum memiliki kerangka metodologi untuk mengembangkan Ekonomi Pancasila sebagai paradigma ilmu dan kebijakan perekonomian di Indonesia. Setelah mendapatkan data-data riil ekonomi masyarakat Indonesia, persoalannya kemudian adalah apa yang harus dikembangkan? Hal ini menjadi persoalan filsafat karena menyangkut pengelolaan data tersebut untuk menjadi teori atau ilmu. Keempat, analisis yang akan dipakai untuk menjelaskan data-data yang didapatkan dari metode induktif-empirik tersebut masih belum ada penjelasan yang memadai.

D. Penutup

Filsafat Ekonomi Pancasila, yang menggambarkan konsekuensi dipilihnya ideologi Pancasila sebagai dasar pengembangan metodologi ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, telah dijabarkan oleh Mubyarto dengan sangat baik. Mubyarto menjelaskan dasar moral perilaku berekonomi manusia Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, bersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Ekonomi Pancasila Mubyarto adalah suatu pendekatan dalam melihat perilaku para pelaku ekonomi di Indonesia. Perilaku berekonomi yang diamati adalah ekonomi rakyat yang bekerja di dalam sistem sosial-budaya, dan nilai lokalitas tertentu. Misalnya, perilaku berekonomi pada masyarakat Jawa, perilaku berekonomi masyarakat Kalimantan, perilaku berekonomi masyarakat Madura, dan perilaku berekonomi masyarakat Sumatera. Sejumlah kumpulan perilaku berekonomi tersebut lalu disimpulkan oleh Mubyarto sebagai ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu yang dikenal dengan Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila Mubyarto, namun demikian belum bisa dikatakan sebagai ilmu karena Mubyarto belum selesai dalam memberikan penjelasan dasar operasional atau kerangka kerja Ekonomi Pancasila dalam ilmu ekonomi yang akan dikembangkan. Mubyarto memang mengatakan dalam berbagai tulisannya untuk mengembangkan Ekonomi Pancasila menjadi ilmu ekonomi alternatif, namun persoalan yang sampai hari ini belum terselesaikan adalah tentang metode, model, dan kerangka kerja Ekonomi Pancasila dalam konteks struktur sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia yang monopluralistik dan kompleks tersebut. Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto juga belum menjelaskan perilaku individu atas pilihan berekonomi dan memilih dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Diterimanya ideologi Pancasila sebagai falsafah kehidupan bangsa dan negara tidak serta merta menjadikan semua masyarakat Indonesia memiliki pilihan yang seragam atau sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mubyarto juga belum menje-

laskan prinsip dan kerja Ekonomi Pancasila dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah dengan basis sumber daya manusia yang beragam, berbagai peraturan daerah yang bervariasi, dan kebutuhan masyarakat yang terkontrol. Mubyarto juga belum menjelaskan tentang konsep teori nilai kegunaan dan nilai ekonomi dalam Ekonomi Pancasila, padahal teori nilai sebagai dasar utama untuk dapat menjelaskan sistem ekonomi dan aktivitas ekonomi. Penjelasan tentang model, metodologi, dan teori nilai dalam ekonomi alternatif tersebut juga belum ditunjukkan. Apabila Ekonomi Pancasila Mubyarto yang dikatakan sebagai Ilmu Ekonomi Pancasila yang menjunjung tinggi kelembagaan Pancasila adalah benar, maka dalam kerangka normatif Ilmu Ekonomi Pancasila telah mencantumkan kata Pancasila sehingga secara otomatis dapat dikatakan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Persoalan praktisnya adalah diplomasi ilmu masih rendah di negeri ini sehingga mengakibatkan tidak adanya kedaulatan ilmu di bidang ekonomi. Gagasan ekonomi alternatif dianggap tidak menarik dan usang dalam konteks globalisasi ilmu dan pengetahuan. Cara membangkitkan kembali Ekonomi Pancasila Mubyarto itu yang perlu didiskusikan.

E. Daftar Pustaka

- Adib, Mohamad, 2011, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Clelland, David C. Mc. & Winter, David G., 1987, *Kunci Sukses Keberhasilan Ekonomi, Judul Asli: Motivating Economic Achievement*, penerj.: Sumarno, Gunung Jati, Jakarta.
- Ewing, A.C., 2008, *Persoalan-Persoalan Mendasar Filsafat, Judul Asli: The Fundamental Questions of Philosophy*, Penerj: Uzair Fauzan dan Rika Iffati, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamid, Edy Suandi, 2008, "Jejak Pemikiran Mubyarto", Artikel 3 September 2008. http://mubyarto.org/_artikel.php?parameter=312&id=47, diakses 11/2/12, pukul 3:17.
- Hastangka, 2007, "*Refleksi Kritis Atas Konsep Ekonomi Mubyarto*", Skripsi, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kartasmita, Ginandjar, 1997, "Membangun Ekonomi Pancasila", Makalah disampaikan pada Rakernas AMPI, Jakarta, 26 Agustus 1997, <http://www.ginandjar.com/public/21MembangunEkonomiPancasila.pdf>, diakses 11/2/12 pukul 10:15.
- Lubis, Mochtar, 2008, *Manusia Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Macrone, Michael, 2008, *80 Ide Hebat yang Mengubah Dunia, (Alih*

- bahasa: M. Kahfi*), *Judul Asli: What Archimedes Really Want and 80 other Key Ideas Explained*, Pustaka Baca, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1989, *Ekonomi Pancasila: Untuk Mendukung Tinggal Landas dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*, LEMHANNAS, Jakarta.
- _____, 1997, *Ekonomi Pancasila, Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Aditya Media, Yogyakarta.
- _____, 2003, *Ekonomi Pancasila: Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM*, PUSTEPUGM, Yogyakarta.
- _____, 2004, *Ekonomi Pasar Populis*, Aditya Media, Yogyakarta.
- _____(Ed.), 2004, *Pancasila Dasar Negara, UGM, dan Jati Diri Bangsa*, Aditya Media dan PUSTEP UGM, Yogyakarta.
- _____, 2005, "Lahirnya Ekonomi Pancasila", Makalah seminar bulanan ke-27, Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) UGM, 5 April 2005, diunduh dari <http://www.ekonomi.kerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul27.htm>, diakses 11/2/12 pukul 10:47.
- Madjid dan Swasono (Ed.), 1981, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Notonagoro, 1951, *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Kementerian Penerangan R.I., Jakarta.
- Nangoi, Ronald, 2004, *Pemberdayaan di Era Ekonomi Pengetahuan*, Grasindo, Jakarta.
- Ravertz, Jerome, 2009, *Filsafat Ilmu, Sejarah dan Ruang Lingkup Pembahasan, Penerj.: Saut Pasaribu. Judul Asli: The Philosophy of Science*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Robbins, 2008, *Philosophy of Economics*, diunduh dari <http://plato.stanford.edu/entries/economics/> diakses pada 12/2/12 pukul 10:14.
- Santoso, Heri, 2009, "Filsafat Ilmu Sosial Perspektif Pancasilaisme (Refleksi Kritis atas Konsep Filsafat Ilmu Ekonomi Pancasila Mubyarto)", *Jurnal Filsafat Vol. 19, Nomor 1, April 2009*, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Suryohadiprojo, Sayidiman, 1987, *Menghadapi Tantangan Masa Depan*, Gramedia, Jakarta.
- Sutrisno, Slamet, 2006, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Swasono, Sri-Edi, 2009, "Menegakkan Ekonomi Pancasila". *Proceeding Kongres Pancasila Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Wijaya, Cuk Ananta, 2009, "Filsafat Ekonomi Adam Smith". *Jurnal*

Jurnal Filsafat Vol. 22, Nomor 1, April 2012

Filsafat Vol. 19, Nomor 1, April 2009, Fakultas Filsafat, UGM,
Yogyakarta.